

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Turki merupakan negara yang wilayahnya terbentang di dua benua, yaitu 3 % di Eropa dan 97 % di Asia dan memiliki sejarah politik yang unik. Turki pernah menimbulkan bahaya yang sangat menakutkan bagi negara-negara di Eropa, karena Turki penduduknya hampir 100 % menganut agama Islam tersebut boleh dibilang sebagai tonggak kejayaan Islam masa lalu.

Kekaisaran Ustmani merupakan satu dari tiga kerajaan besar-dua diantaranya Mughal di India dan Safawi di Persia (Iran)-pasca Abassiyah yang berkuasa paling lama yaitu kurang lebih tujuh abad lamanya.¹⁾

Turki dihidupi oleh dua peradaban besar yang terus tumbuh dan berinteraksi yaitu peradaban Islam dan Barat. Attaturk menjadi presiden pertama Turki dan ia menanamkan pengertian bahwa Turki harus menjadi sebuah negara sekuler dan demokratis. Ia mengubah politik Islam yang diwarisi oleh Kekaisaran Ottoman menjadi politik

1) *Republika*, 24 Maret 2000)

2) Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal.103

nasional demokratis (seperti Barat (Westernisasi) dengan berbagai kebijakannya.

Westernisasi dan sekulerisasi bukan hanya dalam bidang institusi, tetapi juga dalam bidang kebudayaan dan adat istiadat. Sekulerisme yang dijalankan Mustafa Kemal tidak sampai menghilangkan agama. Sekulerisasinya berpusat pada kekuasaan golongan ulama dalam soal negara dan dalam soal politik. Oleh karena itu pembentukan partai politik yang berdasarkan agama dilarang seperti Partai Islam, Partai Kristen, dan sebagainya. Yang terutama ditentangnya adalah ide negara Islam.²⁾ Kebijakan awal yang dikeluarkannya tersebut termasuk melakukan modernisasi dan mereformasi struktur sosial politik seperti menggunakan hukum sekuler sesuai dengan sistem hukum yang banyak dipakai di Eropa, menghilangkan kesultanan dan kekhalifaan, dan mendeklarasikan Turki sebagai negara republik yang sekuler dalam amandemen konstitusi tahun 1937. Sudah sejak 1923, sistem politik Turki dibangun mengancam dominasi sekulerisme dalam sistem negara Turki

²⁾ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* PT.Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal.153

landasan peradaban Barat yang demokratis, plural, dan berdasarkan sekuler.

Namun demikian, demokratisasi Turki saat ini sudah jauh berkurang, hal ini disebabkan kuatnya pengaruh militer dalam pemerintahan Turki. Militer dan birokrasi adalah pengawal negara yang tua dan tradisional sementara partai adalah satu-satunya pendatang baru di Turki.³⁾

Peranan militer di Turki-yang masyarakatnya sangat terdidik-terlalu besar dalam sistem politik Turki.⁴⁾ Besarnya peranan militer dalam sistem politik Turki juga menjadi perhatian tersendiri bagi Uni Eropa. Hal inilah alasan yang sering dikemukakan oleh Uni Eropa mengapa sampai sekarang masih menolak keanggotaan Turki di organisasi tersebut.

Dalam lima tahun terakhir ada dua partai politik yaitu **Partai Refah** dan **Partai Fadilah** yang telah dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi Turki atas tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pihak militer. Isu etnik Kurdi dan Politik Islam di Turki yang dianggap mengancam dominasi sekulerisme dalam sistem negara Turki

³⁾ Guillermo O'Donnell, Phillippe C.Schmitter, Laurance Whitehead, *Transisi Menuju Derokrasi, Kasus Eropa Selatan*, LP3ES, Jakarta, 1992, hal.269

⁴⁾ *Republika*, 7 Desember, 1998



telah memaksa Turki selalu berada di bawah bayangan kekuasaan militer yang menjadi benteng paham sekulerisme ala Mustafa Kemal. Kaum militer Turki praktis berada di balik semua keputusan pelumpuhan kekuatan yang dituduh anti sekulerisme baik dari Partai Islam maupun Partai Pro-Etnik Kurdi. Contoh paling akhir tentang pembekuan partai di Turki adalah pembekuan Partai Fadilah (*Virtue Party*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Turki atas tekanan militer. Dalih keputusan tersebut adalah Partai Fadilah melakukan aktifitas kontra konstitusi negara Turki modern yang berbasis pada ideologi Kemal Attaturk dengan sendi sekulerisme.⁵⁾

Lebih jauh lagi, tampilnya partai-partai Islam dengan kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat, memunculkan pertanyaan kritis tentang hubungan Turki. Bagaimana para elit kebijakan luar negeri Amerika Serikat melihat fenomena Islamis di Turki? Apa reaksi Amerika Serikat terhadap pemerintahan berbasis Islamis di Ankara?

Kemenangan Partai Islam dalam pemilu tahun 1995 memunculkan keprihatinan besar di Amerika Serikat,

⁵⁾ *Kompas*, 26 Juni 2001. *Age of Modern Turkey*, Routledge, London, 1993, hal.200

sementara revolusi Islam di Iran masih segar dalam ingatan peruinus kebijakan. Para petinggi Amerika Serikat bimbang bagaimana mereaksi gelombang Islamis di Turki. Bertekad untuk membendung dan menangkal setiap ancaman terhadap kepentingan-kepentingan utamanya di Timur Tengah dan guna memperkuat kontrolnya, pemerintah AS membutuhkan satu sekutu regional yang terpercaya, dan Turki merupakan mitra ideal.

Untuk mempererat hubungan tersebut, Amerika Serikat senantiasa memberikan bantuan baru ekonomi, konsesi-konsesi dagang, dan peningkatan besar-besaran bantuan militer.

Antara tahun 1991-1993 Turki yang memanfaatkan sepenuhnya program perluasan NATO, menerima Amerika Serikat dan Jerman. Turki penerima bantuan perlengkapan militer senilai hampir US\$ 8 miliar dari Amerika Serikat terbesar ketiga setelah Israel dan Mesir, juga merupakan klien terbesar kelima Washington, dengan belanja senjata setinggi US\$ 7,8 miliar pada periode 1984-1994.⁶⁾

Berdasarkan latar belakang masalah yang

⁶⁾ Feros Ahmad, *The Making of Modern Turkey*, Routledge, London, 1993, hal.200

dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengambil judul **"TINDAKAN MILITER TURKI ATAS KEMENANGAN PARTAI ISLAM DAN SIKAP AMERIKA SERIKAT"**.

B. Perumusan Masalah

Kemenangan Partai Politik Islam di Turki telah menimbulkan kekhawatiran bagi para elit sekuler dan pendukung Kemalis. Militer Turki pun turun tangan dalam usaha menekan pemerintahan Islamis tersebut.

Sementara secara global, Barat dan Amerika Serikat juga sangat mengkhawatirkan kemenangan Partai Islam dan pemerintahan Islamis tersebut, karena kecemasan akan terjadinya Revolusi Islam dan gerakan fundamental seperti halnya di Iran dan Aljazair. Namun di sisi lain, tindakan militer terhadap partai politik Islam juga menimbulkan rasa curiga Amerika Serikat akan terjadinya kudeta militer, seperti halnya yang pernah terjadi sebelumnya di Turki. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah : **Bagaimana Tindakan Militer Turki Terhadap Kemenangan Partai Islam dan sikap Amerika Serikat?**



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Mendeskripsikan perkembangan Politik Islam di Turki dan sikap militer terhadap partai politik Islam.
- Menjelaskan hubungan Amerika Serikat-Turki dan kebijakan Amerika Serikat terhadap politik Islam di Turki.
- Menjelaskan sikap Amerika Serikat terhadap tindakan militer Turki pada Partai Politik Islam.

2. Manfaat Penelitian

- Merupakan salah satu masukan / informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya studi Hubungan Internasional.
- Sebagai salah satu informasi bagi peneliti Turki kemudian dipadatkan sebagai bahan pertambahan Amerika Serikat di wilayah Timur.⁸¹ Keanggotaan Turki dalam NATO memiliki arti yang sangat penting karena

D. Kerangka Teori

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Turki berperan penting dalam kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, Kawasan Balkan, dan Eropa. Sebagai anggota NATO, Turki



berperan sebagai salah satu garis pertama pertahanan terhadap Uni Soviet. Makna strategis Ankara tak perlu diragukan. Turki juga berperan sebagai gerbang ke dunia Muslim.⁷⁾

Dengan mengikuti pola-pola kebijakan Barat secara eksplisit, Turki mengalami pergeseran dari sistem pemerintahan satu partai menjadi sistem pemerintahan multi partai yang kompetitif. Ia melakukan lobi untuk dan akhirnya dapat menjadi anggota NATO pada tahun 1952. Pada akhirnya Turki banyak menerima bantuan keamanan dan ekonomi yang bernilai miliaran dolar; kekuatan-kekuatan militernya terlatih, dan diperlengkapi oleh Barat serta terintegrasikan ke dalam struktur komando NATO; basis-basis kekuatan militernya mengacu pada Amerika Serikat.

Turki kemudian dipandang sebagai benteng pertahanan Amerika Serikat di wilayah Timur.⁸⁾ Keanggotaan Turki dalam NATO memiliki arti yang sangat penting karena memberikan ikatan organisasional kuat dengan Barat.

Sejak kemenangan Refah pada pemilu parlementer di

⁷⁾ Patricia Carley, *Turkey's Role in Middle East: A Conference Report*, Washington DC: United States Institute of Peace, 1995.

⁸⁾ Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban*, Terjemahan M. Sadat Ismail, Qalam, Yogyakarta, 2002, hal. 256-257.



Turki tahun 1995, negara paling sekular di Timur Tengah itu dilanda oleh gelombang Islamis. Cita-cita Mustafa Kemal Attaturk tentang sebuah negara modern dan sekular berpola Barat dibayangi keruntuhan.⁹⁾

Namun, sejak awal, militer Turki mengawasi cermat pemerintahan Islamis tersebut, menanti saat yang tepat untuk melancarkan tekanan politik, bahkan kalau perlu kekuatan fisik untuk menumbangkannya. Dalam menempur kaum Islamis, jenderal-jenderal Turki tahu bahwa ada cara yang efektif untuk membangkitkan kekhawatiran laten Washington terhadap kaum Islamis. Sebagai contoh, militer mendaftarkan terorisme Kurdi dan fundamentalisme Islam sebagai "ancaman nomor satu" bagi Turki, menyebut Iran dan Suriah sebagai negaranegara yang mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok lokal yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan semacam itu.¹⁰⁾

Untuk menganalisa dan menggambarkan secara lebih jelas sikap dan kebijakan Amerika Serikat terhadap

⁹⁾ Sami Zubaida, *Turkish Islam and National Identity*, Middle East Report, April/Juni 1996, hal. 11

¹⁰⁾ Fawas A.Gerges, *Amerika dan Islam Politik; Benturan Pcradaban alau Benturan Kepentingan?*, Alvebet, Jakarta, 2002, hal. 259.



tindakan militer Turki pada partai Islam berikut perkembangan Islamis, maka penulis akan menggunakan pendekatan **Perspektif Strategis** dengan menerapkan model *rasionalitas strategis*.

Menurut Mochtar Mas'od, model ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku para pembuat keputusan politik luar negeri adalah rasional, yaitu pemilihan suatu strategi sungguh-sungguh didasarkan pada pertimbangan untung rugi dalam pencapaian suatu tujuan yang jelas.¹¹⁾

Umumnya perancangan strategi politik luar negeri tidak didasarkan pada pertimbangan moral, keyakinan, atau hal-hal emosional. Juga, perancangan strategi adalah tindakan yang penuh perhitungan, bukan tindakan sebelumnya, maka penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

Masalah politik dan pertahanan keamanan merupakan hal penting, karena berdampak langsung pada persepsi para elit kebijakan Amerika Serikat tentang kepentingan utama Islam. Di satu sisi AS mengawatirkan pemerintahan mereka. Ini termasuk perhitungan strategis Amerika Serikat dalam peta Arab-Israel, rawannya akses terhadap

¹¹⁾ Mochtar Mas'od, *Studi Hubungan Internasional; Tingkat Analisis dan Teorisi*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM, Yogyakarta, hal.90

¹²⁾ *Ibid*, hal. 90



minyak Teluk Persia, rentannya pertahanan rezim-rezim Timur Tengah pro-Amerika dari serangan kaum Islamis. Amerika Serikat memanfaatkan betul makna penting Turki baik dari sudut strategis maupun ekonomis. Turki adalah mitra penting NATO, dan masa depannya sebagai negeri Muslim yang demokratis dan sekuler di sebuah kawasan yang rawan sangat penting bagi Amerika Serikat. Dengan semua alasan ini, Turki bisa berdampak menentukan atas kepentingan-kepentingan Amerika di Timur Tengah.

E. Hipotesa

Sebagai kesimpulan awal ataupun jawaban sementara bagi pokok permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan suatu hipotesa sebagai berikut:

"Amerika Serikat memiliki sikap ambivalensi terhadap tindakan militer Turki atas kemenangan partai Islam. Di satu sisi AS mengkhawatirkan pemerintahan Islamis di Turki, di sisi lain Amerika Serikat juga mencemaskan tindakan militer akan menimbulkan kudeta militer."

¹⁹ Ibid, hal. 350

²⁰ Ibid, hal. 385



F. Definisi Konseptional

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang konsep-konsep yang dipergunakan dan kejelasan terhadap alur permasalahan yang akan diteliti, maka perlu kiranya dikemukakan beberapa pengertian.

Militerisme merupakan paham yang berdasarkan kekuatan militer sebagai pendukung kekuasaan, atau dapat juga dikatakan pemerintahan yang dikuasai oleh golongan militer.¹³⁾

Partai politik adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.¹⁴⁾

Ambivalensi merupakan suatu sikap yang kebingungan dalam menentukan dua perasaan yang sama sama muncul,¹⁵⁾

Kudeta merupakan suatu usaha perebutan kekuasaan dengan jalan kekerasan.¹⁶⁾

Menurut Eric A. Nordlinger, kudeta adalah satu

¹³⁾ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 583

¹⁴⁾ *Ibid*, hat. 650

¹⁵⁾ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Penerbit Arkola, Surabaya, 1994, hal. 25

¹⁶⁾ *Ibid*, hat. 385



kegiatan yang direncanakan dan dilakukan dengan sengaja. Ia dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan meniadakan kemungkinan dana dan resikonya.¹⁷⁾

Sedangkan kudeta militer menurut Eric A. Nordlinger adalah didorong oleh tujuan untuk mempertahankan atau mengukuhkan kepentingan kerja sama pihak militer. Walaupun pretorian mengatakan yang sebaliknya, yaitu demi kepentingan umum, konstitusi dan negara-hampir semua kudeta biasanya digerakkan oleh terutama kepentingan militer sendiri dan sekurangnya sebagian dari padanya.¹⁸⁾

Menurut De Santillana, seperti yang dikutip oleh DR. M. Dhiauddin Rais¹⁹⁾ "Islam adalah negara pemerintahan Tuhan langsung. Tuhanlah yang memimpin negara tersebut dan senantiasa mengatur rakyatnya. Negara dalam Islam dipimpin oleh Tuhan, sampai-sampai pegawai lainnya adalah pegawai Tuhan". Berarti negara Islam menurut.

¹⁷⁾ Eric A. Nordlinger, *Militer Dalam Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 91-18) *Ibid*, hal. 274

¹⁸⁾ *Ibid*, hal. 274

¹⁹⁾ DR. M. dhianuddin Rais, *Teori Politik Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 298



pandangannya adalah negara Teokrasi.

Sementara menurut T.W.Arnold menggambarkan karakteristik pemerintahan Islam dengan mengatakan "An autocracy the claimed to be based on divine revelation. This claim on obedience to the despotic power of the Khalifa as a religious duty was impressed upon the faithful".²⁰⁾

Pemerintahan Islam itu berbentuk autokrasi dengan mengklaim bahwa hal itu dibangun di atas landasan wahyu Tuhan. Telah menjadi kewajiban agama yang pasti bagi individu Muslim untuk mentaati perintah despotik yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Dengan demikian, para orientalis sepakat bahwa pemerintah Islam adalah pemerintahan totaliter dan despotik.

G. Definisi Operasional

Menunjuk pada pendapat Mochtar Mas'od definisi operasional adalah "..... serangkaian prosedur yang mencandra (menggambarkan) kegiatan yang harus dilakukan kala kita hendak mengetahui eksistensi empiris atau

²⁰⁾ T. W.Arnold, *The Caliphate, The Encyclopedia of Islam, Vol.11, hal.884.*



derajat eksistensi empiris suatu konsep".²¹⁾

Untuk pertamakalinya dalam sejarah modern Turki, golongan Islamis, sebagaimana diwakili oleh Partai Refah, meraih kemenangan politik ketika mereka menanggung lebih dari 21 persen suara rakyat dan 158 kursi dari 550 kursi di Majelis Nasional pada pemilu parlementer, Desember 1995. Pemimpin Refah Necmettin Erbakan akhirnya bisa menjadi perdana menteri.

Jauh sebelum kemenangan Refah dalam pemilu 1995, barisan politisi sekular telah membunyikan tanda bahaya tentang "tantangan terhadap sekularisme". Mantan presiden Kenan Evren memperingatkan publik bahwa bahaya-bahaya yang dihadapi Turki adalah komunisme, fasisme, dan reaksi religius.²²⁾

Pada akhir Februari 1997, para jenderal Turki, dengan menggunakan Dewan Keamanan Nasional-lembaga sipil militer yang bertugas menangani masalah-masalah keamanan yang sensitif sebagai instrumen militer melancarkan ofensi penuh terhadap pemerintahan Erbakan.

Didorong oleh militer, seorang jaksa senior

²¹⁾ Mochtar Mas'od, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990.

²²⁾ Ronnie Margulies dan Ergin Yildizoglu, *The Political Uses of Islam In Turkey*, Middle East Report, Juli/Agustus 1998, hal. 12



melontarkan dakwaan pada pertengahan 1996, untuk membekukan Refah atas dasar bahwa partai ini membahayakan landasan pokok sekularisme dan merangsang suasana perang saudara. Sementara, Amerika Serikat dengan berkuasanya kaum Islamis di Turki, takut pada dampak-dampak kebijakan luar negeri Islam revolusioner. Yang paling ditakuti elit kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah efek-efek pengguncangan oleh militan Islam terhadap stabilitas dan keamanan negara-negara penghasil minyak di Teluk Persia serta proses perdamaian Arab-Israel, dua tiang utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan ini.

Para pejabat Amerika Serikat memandang Turki sebagai negara garis depan dalam pertarungan global antara kekuatan-kekuatan reformis, modernis, dan sekularisme dan negara-negara terkebelakang, intoleran, dan anti-Barat; antara kekaburan religius dan modernisme peradaban.²³⁾ Dalam arti geostrategis para pemimpin dan tokoh kebijakan Amerika Serikat menganggap Turki, dengan

²³⁾ Stephen C. Pelletiere dan William T. Johnson, *Turkey's Strategic Position at the Crossroads of Worlds Affairs*, NC. Strategic Studies Institute, US Army War College, 1993, hal. V



sistem politik sekularnya, ini sebagai model bagi negeri-negeri Muslim dan sebagai benteng terhadap penyebaran Islam revolusioner. Berkuasanya kaum Islamis dan munculnya tekanan dari pihak militer di Turki menjadi masalah bagi Amerika Serikat. Sementara Turki mempunyai peran stabilisator yang mutlak bagi Amerika Serikat dalam sebuah wilayah yang amat sensitif seperti Timur Tengah. Terjadinya dilema politik internal di Turki menimbulkan keraguan bagi para elit pembuat kebijakan Amerika Serikat. Di satu sisi Amerika Serikat mengkhawatirkan berkuasanya kaum Islamis dan di sisi lain Amerika Serikat juga mencemaskan tindakan-tindakan militer terhadap pemerintah Islam.

• Membatasi kajian

H. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian konsep dan teori yang tepat

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah **Metode Deskriptif**, yaitu suatu metode yang mencoba menggambarkan gejala-gejala fenomena yang ada ataupun memberikan gambaran tentang kenyataan / situasi yang berdasarkan data-data yang ada. Kemudian



dilanjutkan dengan melakukan interpretasi agar dapat menjelaskan dan menganalisa dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti, dan terakhir berusaha untuk memprediksikannya.

2. Teknik Penelitian *Library Research*

Penelitian ini menerapkan pola pengolahan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan (**Library Research**) dari beberapa literatur: buku, masalah, jurnal, laporan media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya. (Sinningg 2001).

Pengolahan data dilakukan guna menghasilkan laporan penulisan yang tersusun secara sistematis sehingga memenuhi standar ilmiah, langkah-langkahnya:

- Menetapkan pokok masalah
- Membatasi kajian
- Mengumpulkan data
- Menetapkan konsep dan teori yang tepat
- Menjelaskan data-data dengan menggunakan konsep dan teori yang dipakai dan menarik kesimpulan.

I. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penulisan casti akan ditetapkan

jangkauan atau batasan penulisan agar penulisan mengarah pada sasaran masalah pada periode waktu tertentu. Pembatasan penulisan ini adalah untuk memudahkan penulis dalam pencarian bahan dan dapat menganalisa dengan tepat berdasarkan teori yang dipakai.

Penulisan ini difokuskan pada tindakan militer terhadap partai politik Islam di Turki dan reaksi Amerika Serikat terhadap sikap militer tersebut. Jadi batasan penulisan ini adalah sejak kemenangan Partai Islam pada pemilu tahun 1995 hingga 2001.

Pola pertama, adalah Isolationis, merupakan sikap yang dimunculkan oleh para pengambil keputusan politik luar negeri Amerika Serikat. Mulai berlaku pada masa awal penerapan politik luar negeri yang selanjutnya menjadi kebijaksanaan. Alasan dasar dari kebijaksanaan ini adalah adanya politik imperialisme Eropa yang merasa besar (great power) terhadap negara-negara lemah di luar Eropa sendiri.

Sifat isolationis Amerika Serikat dikembangkan lebih lanjut oleh James Monroe pada tahun 1823, dengan

